LAPORAN

HASIL SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (PENGGUNA JASA) FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS HALU OLEO TW III

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HALU OLEO

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelayanan publik yang dilakukan oleh FMIPA UHO masih jauh dari kata sempurna, karena masa kini masyarakat semakin kritis seiring dengan kemajuan teknologi. Media sosial yang semakin berperan penting didalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu faktor pengontrol pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Seringnya masyarakat mengkritisi layanan pemerintah melalui media sosial mau tidak mau harus disikapi pemerintah dengan cermat. Dengan melalui media sosial masyarakat berusaha untuk mengontrol, mengawasi jalannya pelayanan publik ke arah yang lebih baik, yang melayani. Untuk itu pelayanan publik yang dihadirkan juga harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang tentunya juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh FMIPA UHO dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Berdasarkan hal tersebut FMIPA UHO melaksanakan survei IPK dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

2. Dasar Pelaksanaan Survey Indek Persepsi Korupsi

Landasan hukum dalam penyusunan Survei Indeks Persepsi Korupsi ini adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada FMIPA UHO ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SPK

1. Pelaksanaan SPK

Survei Persepsi anti Korupsi (SPK) terhadap layanan pada FMIPA UHO diberikan kepada pengguna layanan dalam bentuk e-kuesioner (link). Pemilihan e-kuesioner dilakukan dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi. E-kuesioner tersebut dapat diakses oleh pengguna layanan dengan mudah. Adapun linknya adalah :

<https://forms.gle/fiffE51b8cz5ojVP6>

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk melakukan survei persepsi korupsi menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran *Skala Likert*. *Skala Likert* merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Pada *skala likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap sesuatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur survei persepsi korupsi terdiri dari 10 indikator yaitu :

- a. Manipulasi Peraturan
- b. Penyalahgunaan Jabatan
- c. Menjual Pengaruh
- d. Transaksi Biaya
- e. Biaya Tambahan
- f. Hadiah
- g. Transparansi Biaya

- h. Percaloan
- i. Perbuatan Curang
- j. KKN

3. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan pada Unit Layanan Terpadu FMIPA UHO yang pernah mendapatkan/menggunakan layanan. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri secara daring oleh responden sebagai penerima layanan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan

4. Waktu Pelaksanaan SPK

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu tertentu yaitu setiap tiga bulan. Survei saat ini dilakukan mulai tgl 1 juni s.d 30 september 2023. Tahapan dalam pelaksanaan survei adalah :

1. Persiapan;
2. Pengumpulan data;
3. Pengolahan data dan analisis data;
4. Penyusunan dan Pelaporan hasil.

5. Penentuan Jumlah Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di FMIPA UHO. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan mengisi link survei dapat digunakan sebagai sampel

BAB III
HASIL PENGOLAHAN DATA SPK

1. Jumlah Responden SPK

Berdasarkan hasil survei banyaknya responden yang mengisi link kuesioner diperiode ini sebanyak 257 orang. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Gambaran Umum Responden

1	GENDER	LAKI-LAKI	82	31,91%
		PEREMPUAN	175	68,09%
2	PENDIDIKAN	SMA	6	2,33%
		D/III	5	1,95%
		S1	236	91,83%
		S2	10	3,89%

2. Indeks Persepsi Korupsi

Nilai survei Indeks Persepsi Korupsi dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei indeks persepsi korupsi terhadap 10 unsur yang dikaji. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai :

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N : Bobot Nilai per unsur

Setelah diperoleh nilai bobot rata-rata tertimbang pada setiap indikator, maka tahap selanjutnya adalah pengukuran indeks. Metode yang digunakan pada pengukuran indeks adalah nilai rata-rata tertimbang masing-masing indikator pelayanan sebagai berikut :

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi pertanyaan}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPK yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Konversi Indeks} = \text{Hasil Indeks} \times 25$$

Selanjutnya kategorisasi mutu pelayanan di FMIPA UHO ditentukan sebagai berikut :

Table 2. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	44,00 – 62,50	C	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,75 – 81,25	B	Cukup Bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,50 – 100,00	A	Bersih dari korupsi

Berdasarkan hasil survei persepsi korupsi di FMIPA UHO dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada FMIPA sebesar 95,50 berada pada kategori **“Bersih dari Korupsi”** pada interval 81,50s/d 100.

Hasil IPK tersebut di atas, terdiri dari 10 (sepuluh) ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap ke sepuluh ruang lingkup tersebut.

Tabel 3. Rata-Rata Skor dan Peringkat pada Setiap Indikator Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi di FMIPA UHO

No	Ruang Lingkup	Rata-Rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3,68	Bersih dari Korupsi	10
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,79	Bersih dari Korupsi	8
3	Menjual Pengaruh	3,82	Bersih dari Korupsi	7
4	Transaksi Biaya	3,83	Bersih dari Korupsi	6
5	Biaya Tambahan	3,84	Bersih dari Korupsi	5

6	Hadiah	3,88	Bersih dari Korupsi	1
7	Transparansi Biaya	3,73	Bersih dari Korupsi	9
8	Percaloan	3,85	Bersih dari Korupsi	3
9	Perbuatan Curang	3,87	Bersih dari Korupsi	2
10	KKN	3,85	Bersih dari Korupsi	4

BAB IV

ANALISIS HASIL SPK

1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data SPK menunjukkan bahwa semua unsur telah memberikan nilai yang baik yaitu bersih dari korupsi. Namun demikian dari 10 unsur tersebut dapat diuraikan tiga unsur yang mendapatkan nilai terendah yaitu manipulasi peraturan dengan nilai 3,68 lalu unsur transparansi biaya memberikan nilai 3,73 dan unsur penyalahgunaan jabatan dengan nilai 3,79. Disamping itu juga terdapat tiga unsur yang memberikan nilai tinggi yaitu unsur hadiah dengan nilai 3,88, selanjutnya unsur perbuatan curang memberikan nilai 3,87 dan unsur percaloan dengan nilai 3,85

Selanjutnya rata-rata nilai IPK per unsur layanan dapat di lihat pada diagram beriku :

2. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi, FMIPA UHO memperoleh hasil A atau bersih dari korupsi. Perolehan ini perlu dipertahankan dengan melakukan sosialisasi terkait anti korupsi, anti pungli, anti gratifikasi dan pengawasan yang berkelanjutan sehingga senantiasa memperoleh kepercayaan masyarakat. Tindak lanjut pada unsur manipulasi aturan yang memperoleh nilai terkecil adalah:

1. Menginformasikan persyaratan dan prosedur yang harus dilengkapi dan dilewati secara lebih terbuka kepada Pengguna Layanan melalui media sosial atau website FMIPA.
2. Memperbaiki prosedur yang mungkin masih berbelit dan membingungkan Pengguna Layanan sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

3. Tren Nilai SPK

Untuk membandingkan indeks persepsi korupsi secara berkala atau melihat perubahan tingkat persepsi korupsi diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisis survei digunakan untuk melakukan evaluasi persepsi korupsi terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan serta melihat kecenderungan (tren) kualitas pelayanan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

Tren tingkat persepsi Korupsi di FMIPA dapat dilihat melalui grafik berikut:

BAB IV

KESIMPULAN

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan oleh FMIPA diperoleh informasi bahwa FMIPA UHO memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,82 atau masuk pada kategori bersih dari korupsi.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1.

Pertanyaan Kuesioner

Lightbulb icon Tell me what you want to do Share

aBbCcDd AaBbCcDc AaBbCcI AaBbCcE AaB AaBbCcE

Normal No Spacing Heading 1 Heading 2 Title Subtitle

Find Replace Select Editing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan				
Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu/Saudara (1)	Selalu (2)	Jarang (3)	Sering (4)	Tidak Ada (5)
Eskternal				
1. Pelayanan oleh petugas tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku serta dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)	1	2	3	4
2. Dalam memperoleh layanan FMIPA UHO secara cepat dan mudah disertai dengan adanya penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)	1	2	3	4
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Fakultas MIPA UHO) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? (Menjual Pengaruh)	1	2	3	4
4. Pernahkah dipersulit dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? (Transaksi Biaya)	1	2	3	4
5. Apakah diminta untuk membayar tidak sesuai tarif resmi atau ada biaya tambahan? (Biaya Tambahan)	1	2	3	4
6. Apakah diminta memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta)? (Hadiah)	1	2	3	4
7. Tidak menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah melakukan pembayaran? (Transparansi Biaya)	1	2	3	4
8. Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Fakultas MIPA UHO? (Percaloan)	1	2	3	4
9. Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Fakultas MIPA UHO? (Perbuatan Curang)	1	2	3	4
10. Prosedur pelayanan yang ditetapkan tidak memadai dan berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme.	1	2	3	4

221	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
222	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
223	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
224	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
225	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
226	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
227	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
228	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
229	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
230	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
231	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
232	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	
233	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
234	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
235	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
236	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
237	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
238	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
239	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	
240	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
241	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
242	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	
243	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	
244	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	
245	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
246	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	
247	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
248	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
249	3	3	2	3	4	4	2	4	4	3	
250	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
251	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
252	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
253	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
254	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
255	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
256	3	4	4	4	4	4	4	2	2	3	
257	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Jumlah	947	975	983	985	988	996	958	990	994	990	
Nilai NRR per RL	3,68	3,79	3,82	3,83	3,84	3,88	3,73	3,85	3,87	3,85	
NRR Tertimbang	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,37	0,39	0,39	0,39	3,82
IPK Unit Layanan	95,5										